

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara maka membutuhkan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan (Todaro, 2009). Salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dan perlu menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan.

Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi potensi bagi suatu wilayah, jika tidak berkualitas maka akan menjadi beban bagi pembangunan di wilayahnya. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Pembangunan manusia menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) adalah proses memperluas pilihan–pilihan penduduk. Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu : panjang

umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. (Ginting, 2008).

Ada 4 aspek utama yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan manusia, yaitu: *Pertama*, peningkatan produktivitas dan partisipasi penuh dalam lapangan pekerjaan dan perolehan pendapatan. Dalam komponen ini, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bagian dari model pembangunan manusia. *Kedua*, peningkatan akses dan kesetaraan memperoleh peluang-peluang ekonomi dan politik. Dengan kata lain, penghapusan segala bentuk hambatan ekonomi dan politik yang merintangangi setiap individu untuk berpartisipasi sekaligus memperoleh manfaat dari peluang-peluang tersebut. *Ketiga*, adanya aspek keberlanjutan (*sustainability*), yakni bahwa peluang-peluang yang disediakan kepada setiap individu saat ini dapat dipastikan tersedia juga bagi generasi yang akan datang, terutama, daya dukung lingkungan atau modal alam dan ruang kebebasan manusia untuk berkreasi. *Keempat*, pembangunan tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga oleh masyarakat. Artinya, masyarakat terlibat penuh dalam setiap keputusan dan proses-proses pembangunan, bukan sekedar obyek pembangunan. Dengan kata lain adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (UNDP 2012).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografi, gender, dan lokasi lingkungan. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegritas dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan atau *vicious crycle of poverty* (sukmaraga, 2011).

Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengaruh kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi yang paling penting adalah keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi disegala bidang pembangunan (BPS 2011).

Berdasarkan **TABEL 1.1** menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Negara Singapore tertinggi di ASEAN dengan skor IPM 90,1, Brunei Darussalam dengan skor 85,2, Malaysia dengan skor 77,3, Thailand dengan skor 72,2, Indonesia dengan skor 68,4, dan Myanmar menduduki peringkat terakhir dengan skor 52,4.

TABEL 1.1

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Negara- negara ASEAN, Tahun 2013

No.	Negara	Skor IPM	Peringkat	Perubahan peringkat IPM 2008-2013	Rata-rata Pertumbuhan (%) 2000-2013	Kelompok
1.	Singapura	90,1	9	14	0,92	Very High
2.	BrunaiDarussalam	85,2	30	2	0,27	Very High
3.	Malaysia	77,3	62	1	0,58	High
4.	Thailand	72,2	89	3	0,83	High
5.	Indonesia	68,4	108	4	0,90	High
6.	Filipina	66,0	118	-1	0,49	High
7.	Vietnam	63,8	121	2	0,81	Medium
8.	Kamboja	58,4	136	-1	1,75	Medium
9.	Laos	56,9	139	3	1,44	Medium
10.	Myanmar	52,4	150	0	1,64	Medium

Sumber: UNDP, 2014

Berdasarkan konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

1. Tinggi / Very High : IPM lebih dari 80,0
2. Menengah Atas / High : IPM antara 66,0 – 79,9
3. Menengah Bawah / Medium : IPM antara 50,0 – 65,9
4. Rendah / Low : IPM kurang dari 50,0

Pembangunan manusia di Indonesia masih harus ditingkatkan. Hal ini tercermin dari laporan bertajuk “*Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerability and Building Resilience*” yang diluncurkan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNDP menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2013 sebesar 68,4. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,44 persen bila dibandingkan dengan skor IPM pada 2012 yang sebesar 68,1. Meski mengalami kenaikan, peringkat IPM Indonesia tetap bertengger di urutan 108 dari 287 negara. Di regional ASEAN, Indonesia berada pada kelompok yang sama dengan Filipina, Malaysia, Thailand (UNDP; 2014). Indeks pembangunan manusia bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antar daerah. Pembangunan manusia menjadi penting karena apabila suatu daerah tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial maka dapat menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun dan memajukan daerahnya. Jadi, sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan **TABEL 1.2** data IPM Nasional dua tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia maka semakin tinggi kualitas hidup rakyat Indonesia. Dari data di atas juga terlihat bahwa ada beberapa Provinsi yang nilai Indeks Pembangunan Manusianya masih relatif rendah seperti di Pulau Papua, NTT dan

NTB. Yang dimana Pulau Papua itu terdiri dari Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

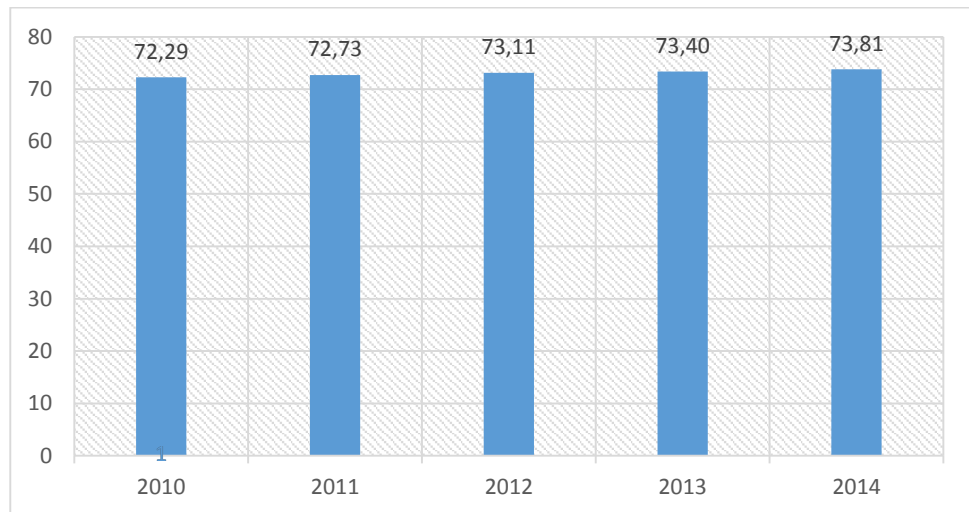
TABEL 1.2

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 2012- 2013

No	PULAU	2012	2013
1	SUMATERA	74,337	74,369
2	JAWA	74,311	74,838
3	BALI	73,49	74,11
4	NTB DAN NTT	67,585	68,25
5	KALIMANTAN	73,39	74,326
6	SULAWESI	72,48	73,513
7	MALUKU	71,2	71,665
8	PAPUA	68,04	70,62

Sumber: BPS, IPM Provinsi dan Nasional, 2013

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2013 Pulau Jawa memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia relatif tinggi, Pulau Jawa terdiri dari 6 Provinsi. Yaitu Provinsi D.K.I Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Banten.



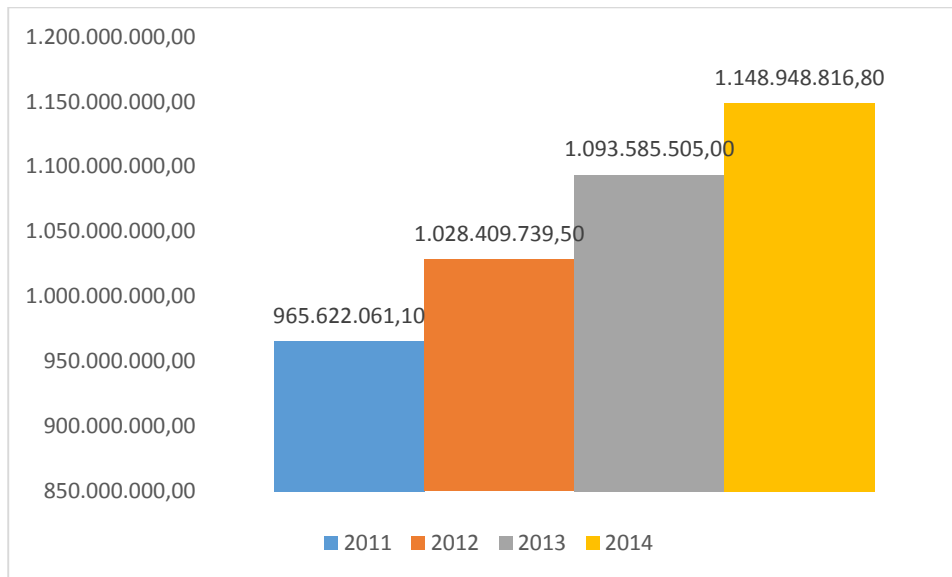
Sumber data: BPS Jawa Barat

GAMBAR 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat

Dari **GAMBAR 1.1** diatas terlihat bahwa angka IPM Provinsi Jawa Barat dari tahun 2010-2014 menunjukkan angka yang signifikan yang terus berfluktuasi positif dalam kurun waktu tersebut. Dengan melihat kenyataan angka IPM di Provinsi Jawa Barat maka peran dan tanggung jawab yang diemban pemerintah menjadi semakin penting, karena dituntut harus mampu untuk melakukan fungsi alokasi atas seluruh kebutuhan pelayanan publik sehingga tercapai kesejahteraan sosial masyarakat, tentunya dalam hal ini yang menjadi prioritas adalah pelayanan publik menyangkut konsep pembangunan manusia.

Dan dari **GAMBAR 1.2** menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 -2014 mengalami pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 sebesar Rp. 965.622.061,10, pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.028.409.739,50, pada tahun

2013 sebesar Rp. 1.093.585.505,00, dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.148.948.816,80.

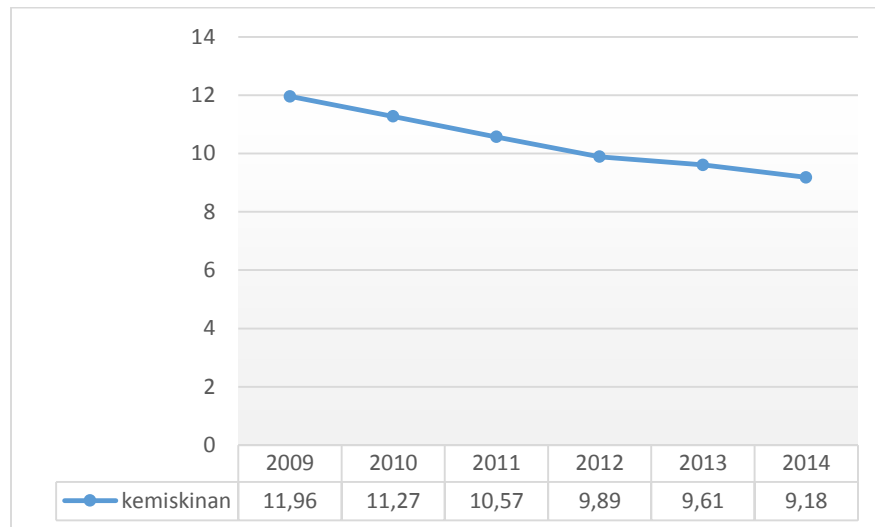


Sumber : *BPS Jawa Barat*

GAMBAR 1.2

PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2014

Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing- masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah tertentu.



Sumber : *BPS Jawa Barat*

GAMBAR 1.3

Persentasi Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat

Indeks Pembangunan Manusia juga memberi dampak positif bagi penurunan kemiskinan wilayah. Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat cenderung menurun selama periode 2009-2014.

Pada **GAMBAR 1.3** menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2009-2014 mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin sebesar 11,96%, pada tahun 2010 sebesar 11,27%, pada tahun 2011 sebesar 10,57%, pada tahun 2012 sebesar 9,89%, pada tahun 2013 sebesar 9,61%, dan pada tahun 2014 sebesar 9,18%.

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci

pertumbuhan secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang mungkin menghambat pertumbuhan Provinsi Jawa Barat adalah kualitas sumber daya manusianya yang relatif rendah.

Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari Upah Minimum Regional (UMR). Upah minimum ini merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya.

Upah Minimum regional (UMR) Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Upah minimum terbesar yaitu Kabupaten Bekasi dengan UMR sebesar Rp. 2.447.445 pada tahun 2014. Dan UMR terkecil yaitu Kabupaten Majalengka dengan UMR Rp. 1.000.000 pada tahun 2014.

Alasan peneliti memilih seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian dikarenakan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia selain itu dinilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat relatif tinggi dan setiap tahunnya meningkat. Dengan peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan fenomena yang sangat menarik, karena Indeks Pembangunan Manusia dapat menggambarkan pencapaian kinerja dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan mengembangkan perekonomian disuatu wilayah.

Berdasarkan latar belakang di atas, Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Regional sangat berpengaruh dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Maka penulis tertarik menelaah lebih dalam tentang Pembangunan Manusia (IPM) melalui penelitian yang berjudul

“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 – 2014”.

I. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia sangat luas maka penulis membatasi pembahasan masalah pada Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Provinsi Jawa Barat dan data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2010 – 2014.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di dalam penelitian ini akan diajukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.

IV. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan tentang hal yang diteliti sehingga mampu membandingkan antara teori yang diterima di dalam bangku perkuliahan dan praktek di lapangan.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai peranan Kemiskinan, PDRB, dan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.

4. Bagi Pemerintah daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan Pemerintah Daerah terutama dalam bidang Pembangunan manusia.